



LAPORAN KINERJA

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented goverment*). Selain itu, Laporan ini juga sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Makassar khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja BPKAD Kota Makassar diukur atas dasar penilaian Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPKAD Kota Makassar Tahun 2021. Laporan ini juga memuat efisiensi yang dihasilkan dari implementasi SAKIP.


Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai dengan target karena pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sangat ditentukan oleh komitmen seluruh pihak-pihak yang terlibat.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kinerja ke depan, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Januari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH *Am*


ks Drs. Muh. Dakhlan, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19740925 199311 1 001

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented goverment*). Selain itu, Laporan ini juga sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Makassar khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja BPKAD Kota Makassar diukur atas dasar penilaian Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPKAD Kota Makassar Tahun 2021. Laporan ini juga memuat efisiensi yang dihasilkan dari implementasi SAKIP.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai dengan target karena pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sangat ditentukan oleh komitmen seluruh pihak-pihak yang terlibat.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kinerja ke depan, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Januari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Drs. Muh. DaKhlan, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19740925 199311 1 001

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Tugas dan Fungsi.....	2
1.4 Permasalahan Utama dan Isu Strategis	3
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 Rencana Strategis	5
2.2 Perjanjian Kinerja 2021.....	6
2.3 Rencana Kerja dan Anggaran 2021.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja	9
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	10
3.3 Realisasi Anggaran.....	28
BAB IV PENUTUP.....	36
LAMPIRAN	

RINGKASAN

EKSEKUTIF

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Yang berorientasi pada prinsip transparansi, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar melaporkan capaian kinerja (*performance result*) selama tahun 2021. Laporan Kinerja mencakup seluruh prinsip pengelolaan keuangan serta perencanaan kinerja yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Capaian Kinerja ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
2	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	WTP	WDP	75%
3	Persentase barang milik daerah yang diyakini kewajarannya oleh BPK	95%	99,83%	105%
Sasaran Strategis 2				
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD				
1	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	90%	96,91	107,68%
2	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%
3	Persentase ASN perangkat daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	90%	44,6%	49,55%
Rata Rata Capaian				89,53%

Secara keseluruhan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar tahun 2021 dinyatakan “cukup berhasil”, yaitu dengan capaian 89,53% dari target yang telah ditetapkan. Dari 6 indikator yang merupakan penjabaran 2 sasaran, 4 indikator dinyatakan “berhasil” karena capaiannya diatas 90% dari target.

Besarnya realisasi anggaran Belanja pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.188.195.175.600 atau 65,86% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 285.741.428.698.

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah adalah keinginan untuk mengelola keuangan dan barang milik daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif maka diperlukan adanya serangkaian peraturan daerah, peraturan walikota, dan keputusan walikota yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaan dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu bentuk akuntabilitas tersebut berupa Laporan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk perwujudan kewajiban pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021. Disamping itu penyusunan LAKIP ini juga bertujuan sebagai alat kendali dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dan untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* pemangku kepentingan.

Selain itu untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar adalah sebagai berikut :

- (1) Kepala Badan;
- (2) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Subbagian Keuangan
- (3) Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - a. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan APBD
 - b. Subbidang Pengendalian Anggaran
- (4) Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 - a. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah
 - b. Subbidang Penatausahaan Belanja Daerah
- (5) Bidang Akuntansi, terdiri atas;
 - a. Subbidang Pembukuan
 - b. Subbidang Pelaporan
- (6) Bidang Barang Milik Daerah, terdiri atas;
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - b. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. BPKAD terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. BPKAD Kota Makassar mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;

2. Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
5. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Permasalahan Utama Dan Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan utama yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada masyarakat. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintahan Kota Makassar.

Dalam mengemban tugas dan fungsi serta kewenangannya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar menghadapi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang masih perlu diatasi dan diantisipasi.

Adapun permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi hingga saat ini adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Perda APBD Kota Makassar yang beresiko terlambat, serta Perda APBD Perubahan yang tidak mencapai kesepakatan.
2. Upaya untuk raih dan mempertahankan Opini BPK Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3. Peningkatan koordinasi dan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP, termasuk didalamnya penyelesaian atas temuan kerugian daerah, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kota Makassar.
4. Pengelolaan aset dan barang milik daerah Pemerintah Kota Makassar yang belum sepenuhnya terintegrasi dan terinventarisasi, serta perlunya perhatian seluruh OPD dalam merencanakan, mengusulkan dan melaporkan data barang milik daerah serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap barang-barang yang dikuasainya.
5. Belum optimalnya Layanan dan Administrasi Perkantoran, serta perlu dilakukan optimalisasi dan Modernisasi pelayanan lingkup BPKAD, melalui peremajaan sarana prasarana perkantoran, peningkatan fasilitas pendukung layanan perkantoran, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang

dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar dengan mengupayakan penerapan ISO yang terkait dengan pelayanan dalam sektor pemerintahan.

6. Tuntutan cepatnya dinamika perkembangan dalam dunia teknologi informasi dan terjadinya sebuah pandemi global *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di akhir tahun 2019 membuat diperlukannya sebuah penyesuaian dalam pemanfaatan dan implementasi kebijakan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dapat menjadi sebuah peluang untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi melalui pembangunan dan pengembangan basis data, sistem informasi, dan infrastruktur TIK yang berorientasi kepada integrasi (baik lingkup internal Kementerian Dalam Negeri, antar Kementerian/Lembaga, dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah), kemudahan berkomunikasi, dan percepatan proses birokrasi sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat secara langsung dirasakan dalam segala aspek tata kelola pemerintahan serta kehidupan masyarakat pada umumnya.

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi BPKAD Kota Makassar.
2. Bab II Perencanaan Anggaran
Pada Bab ini diuraikan mengenai ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
 - B. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.
4. Bab IV Penutup
Berisi kesimpulan umum atas pencapaian kinerja, serta langkah yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis BPKAD Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026. Yang didalamnya termuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Adapun visi yang termuat dalam dokumen RPJMD yaitu:

Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ & Smart City” dengan imunitas Kota Yang Kuat Untuk Semua

Misi untuk mewujudkan visi RPJMD tersebut adalah:

1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.
2. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.
3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “*sombere’ dan smart city*” untuk semua.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, keterkaitan yang sangat erat pada misi kesatu. Untuk misi kesatu terkait dengan pelayanan di BPKAD meliputi yakni Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi, dengan Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Selanjutnya, dalam Renstra BPKAD juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2026, yaitu :

1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang berkualitas dan bermanfaat (Tertib, Taat pada perundang-undangan, Efisien, Transparan dan Akuntabel); dan
2. Meningkatkan kapasitas organisasi dalam Pengelolaan SDM, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh BPKAD pada akhir periode perencanaan (Tahun 2026). Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2021 disajikan pada tabel 1.

2.2 Perjanjian Kinerja 2021

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Kerja Tahun 2021, maka target-target kinerja tahunan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel 1
Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2021
sebelum perubahan

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terciptanya APBD yang berkualitas dengan tepat waktu	Tersusunnya APBD yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tepat Waktu
2	Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Persentase ketepatan waktu dokumen penatausahaan keuangan sesuai dengan SAP	100%
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP
3	Terwujudnya sistem pengelolaan barang milik daerah yang tertib administrasi	Persentase barang milik daerah yang diyakini kewajarannya oleh BPK	95%

Perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar pada tahun 2021 mengalami 1 (satu) kali perubahan, dimana Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala BPKAD pada Januari 2021, kemudian dilakukan revisi pada Oktober 2021. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

1. Pada Agustus 2021 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2021;
2. Pada September 2021 ditetapkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

3. Adanya penyesuaian Rencana Kerja Perubahan terhadap Rencana Strategis BPKAD, antara lain, perubahan alokasi anggaran dan perubahan pelaksanaan kegiatan.
4. Pada Maret, September dan Desember 2021 dilakukan pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas menjadi Pejabat Fungsional, sebagai tindak lanjut arahan Presiden.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur :

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. *Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;*
- b. *Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan*
- c. *Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.*

Tabel 2
Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2021
Setelah dilakukan perubahan

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat Waktu
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	WTP
		Persentase barang milik daerah yang diyakini kewajarannya oleh BPK	95%
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	90%
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	100%

		Persentase ASN perangkat perangkat daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	90%
--	--	--	-----

Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2021 setelah revisi inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja BPKAD Tahun 2021 ini.

2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2021, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2021, yang terdiri dari 3 (tiga) program sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	263.889.243.286
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.667.876.800
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.730.308.612

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kepala BPKAD pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2021 merupakan kinerja tahun awal Renstra BPKAD 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 adalah sebesar 89,53% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2021

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
2	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	WTP	WDP	75%
3	Persentase barang milik daerah yang diyakini kewajarannya oleh BPK	95%	99,83%	105%
Sasaran Strategis 2				
Meningktanya Kualitas Sumber Daya Manusia, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD				
1	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	90%	96,91	107,68%
2	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%
3	Persentase ASN perangkat daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	90%	44,6%	49,55%
Rata Rata Capaian				89,53%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 (empat) dari 6 (enam) Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Kepala BPKAD pada tahun 2021, memiliki Realisasi kinerja lebih dari 90% dari yang telah ditargetkan.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan hasil capaian yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan yang mencakup indikator kinerja, target dan realisasi kinerja, serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dengan menggunakan tabel pengukuran kinerja, yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasi.

3.2.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah”

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
2	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	WTP	WDP	75%
3	Persentase barang milik daerah yang diyakini kewajarannya oleh BPK	95%	99,83%	105%

Indikator Kinerja 1**Ketepatan Waktu Penetapan APBD**

Capaian indikator kinerja sasaran Ketepatan Waktu Penetapan APBD diukur melalui indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 4
Target dan Realisasi Sasaran 1 Capaian Indikator 1
Ketepatan Waktu Penetapan APBD

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%

Capaian indikator kinerja 1 (satu) ketepatan waktu penetapan APBD dengan target indikator Tepat Waktu dengan realisasi tepat waktu, memperoleh capaian kinerja 100% atau termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2021 melaksanakan penyusunan APBD Perubahan Tahun 2021 dan APBD Tahun 2022, dimana pembahasan APBD telah melalui seluruh mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Pihak Eksekutif dan Legislatif Pemerintah Kota Makassar. Berikut merupakan kriteria yang harus dipenuhi ketika penyusunan APBD, yaitu:

Tabel 5
Kriteria Penyusunan APBD

No	Dokumen	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Penetapan APBD Pokok Tahun 2022	1 Bulan sebelum dimulainya TA. Berkenan	24 November 2021	Tepat Waktu
2.	Penetapan APBD Perubahan Tahun 2021	3 Bulan sebelum anggaran selesai (akhir september)	30 September 2021	Tepat Waktu

Kriteria tepat waktu didasarkan pada tanggal penandatanganan berita acara kesepakatan penetapan APBD oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022, kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Peraturan Daerah Tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenan. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi target telah memenuhi yaitu **TEPAT WAKTU**.

Faktor Penyebab Keberhasilan :

1. Kerjasama dan dukungan yang baik dari seluruh SKPD, terutama Pihak Legislatif dalam hal ini DPRD Kota Makassar yang selalu mendampingi Pemerintah Kota Makassar sebagai mitra strategis.
2. Dilakukan Sosialisasi Permendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran belanja dan pendapatan Tahun Anggaran 2021, dilakukan kepada seluruh SKPD agar secara individu dan organisasi dapat memahami tentang tata cara penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 sehingga dalam proses penyusunannya tidak ditemukan kendala kendala yang berarti.
3. Asistensi dan evaluasi RKA dilakukan kepada seluruh SKPD untuk melihat kesesuaian rekening belanja yang ada pada RKA SKPD.
4. Mempercepat proses penyusunan dan asistensi RKA-SKPD serta mendorong seluruh SKPD untuk segera menyelesaikan DPA-SKPD sesuai dengan hasil asistensi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Makassar.

Indikator Kinerja 2

Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan

Capaian indikator kinerja sasaran Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan diukur melalui indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 6
Target dan Realisasi Sasaran 1 Capaian Indikator 2
Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	WTP	WDP	75

Capaian indikator kinerja 2 (dua) Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), realisasi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Capaian Realisasi kinerja adalah 75% atau termasuk dalam kategori Sedang.

Tabel 7
Kriteria Capaian Kinerja
Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan

No	Indikator Penilaian	Capaian Kinerja
1.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100%
2.	Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	75%
3.	Opini Tidak Wajar	50%
4.	Opini Tidak Menyatakan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)	25%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahunj yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Kota Makassar Tahun 2020 yang memuat opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** dengan Nomor 32.B/LHP/XIX.MKS/05/2021 tanggal 17 Mei 2021.

Faktor Penyebab Tidak Mencapai Target :

1. Pemerintah Kota Makassar menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2021 disebabkan tidak adanya Perubahan Perda APBD;
2. Kekurangan Kas pada Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Daya (RSUD Daya).

Rekomendasi :

1. Mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melakukan perubahan penjabaran APBD;
2. Memerintahkan TAPD untuk mempedomani ketentuan dalam penyusunan APBD sesuai ketentuan berlaku;

Berdasarkan tabel diatas, persentase aset yang diyakini kewajarannya oleh BPK sebesar 99,83% dari total nilai aset 32.719.829.175.446. Sehingga kriteria persentase Barang Milik Daerah sebesar 105% dari target awal tahun. Upaya dalam mewujudkan tertib pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara berkelanjutan, karena penanganan barang milik daerah yang tidak tertib berpotensi kehilangan dan/atau penyalahgunaan barang milik daerah, misalnya yang berupa tanah, kendaraan, ataupun barang milik daerah lainnya yang dikuasai oleh pihak lain secara tidak sah. Demikian pula dalam aspek penatausahaan barang milik daerah, potensi terjadinya ketidakwajaran penyajian nilai aset tetap maupun aset persediaan dan berimplikasi pada opini laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, dari sisi penguatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran juga perlu dioptimalkan melalui program dan kegiatan penyusunan standar harga barang maupun penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah pengadaan dan pemeliharaan. Nilai aset yang bermasalah berdasarkan laporan sebesar Rp.56.622.609.347, dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Permasalahan Aset Tanah : 52.820.824.500

Nilai Temuan Aset Kendaraan : 3.424.621.600

Total Temuan LKPD terakhir = 3.801.784.847,4

Faktor Penyebab Keberhasilan :

1. Tertib Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah.
 - Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah bersesuaian dengan rencana kerja SKPD, yang dilakukan penelaahan terhadap usulan rencana kebutuhan barang milik daerah yang diajukan oleh SKPD sebelum ditetapkan.
 - Penetapan Standar Harga Barang untuk kebutuhan penyusunan anggaran belanja barang, melaku survey harga barang kepada pelaku usaha atau melalui pendekatan yang ditetapkan, dengan sesuai penggolongan, kode barang milik daerah, dan kode rekening belanja barang.
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah.
 - Penatausahaan barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah, dilaksanakan sesuai kaidah peraturan perundang-undangan diantaranya harus bersesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penatausahaan dimulai di tingkat Unit Kerja, SKPD, dan selanjutnya dikonsolidasikan di tingkat Pemerintah Kota Makassar.
 - Pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah dilakukan secara lengkap, akurat, rinci, dan tepat waktu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

- Peningkatan kualitas dan kuantitas penatausahaan barang milik daerah melalui pembinaan kepada seluruh pengurus barang secara berkelanjutan.
 - Rekonsiliasi terhadap laporan barang milik daerah yang disampaikan oleh seluruh SKPD dan Unit Kerja, untuk memastikan kesesuaian barang milik daerah yang dilaporkan terhadap indikator realisasi belanja modal, laporan operasioanal, data pendistribusian, pengalihan status penggunaan, data penerimaan yang bersumber dari perolehan lainnya yang sah, dan lain sebagainya.
 - Tersedianya data base barang milik daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - Penilaian dalam rangka penatausahaan barang milik daerah, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Pengamanan Barang Milik Daerah
- Tersedianya data pemanfaatan barang milik daerah.
 - Pengamanan administratif melalui kodefikasi barang milik daerah.
 - Kelengkapan dan penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah. Kelengkapan bukti kepemilikan merupakan fungsi pengamanan barang milik daerah yang kewenangannya dilakukan oleh SKPD. Namun demikian, melalui Peraturan Walikota Makassar Nomor 107 Tahun 2006 fungsi pensertifikatan tanah pemerintah menjadi salah satu kewenangan Dinas Pertanahan Kota Makassar. Adapun penyimpanan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Tanah, BPKB kendaraan dinas, merupakan tugas BPKAD Kota Makassar.
 - Inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan paling kurang setiap lima tahun.
 - Pengamanan secara fisik berupa pemagaran, pemasangan papan informasi aset, dan penjagaan aset-aset tertentu. BPKAD melakukan koordinasi untuk mendorong SKPD atau melalui Kuasa Pengguna Barang harus optimal mengamankan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, dengan berkoordinasi dengan SKPD teknis dengan kewenangan terkait lainnya, antara lain Dinas Pertanahan, Bagian Kerjasama.
 - Tertib penggunaan barang milik daerah sesuai tugas dan fungsi melalui Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada masing-masing SKPD.
 - Kordinasi penyelesaian sengketa tanah, baik litigasi maupun non litigasi.
 - Penertiban barang milik daerah yang dikuasai pihak lain. SKPD melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya melalui pemantauan dan penertiban.

- Tersedianya sarana yang memadai untuk pengamanan secara fisik barang milik daerah, diantaranya penyimpanan barang persediaan, dokumen kepemilikan, barang milik daerah dalam proses penjualan, dan lain sebagainya.
4. SDM yang handal dan kompeten
- Pengelolaan barang milik daerah ditunjang dengan SDM dengan pengetahuan dan keterampilan baik, untuk tertibnya perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemusnahan dan penghapusan, pengamanan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian.
 - Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur pengurus barang SKPD dan unit kerja melalui kegiatan pelatihan pengelolaan barang milik daerah.
 - Koordinasi dan petunjuk teknis kepada seluruh SKPD.
 - Informasi dan pengungkapan permasalahan pengelolaan barang milik daerah.
5. Pengelolaan barang milik daerah Berbasis Teknologi Informasi
- Tersedianya aplikasi pengelolaan barang milik daerah berbasis Teknologi Informasi.
 - Cakupan aplikasi pengelolaan barang milik daerah untuk menunjang kebutuhan pengelolaan barang milik daerah.
 - Integrasi aplikasi pengelolaan barang milik daerah dengan aplikasi lain terkait khususnya aplikasi pengelolaan keuangan daerah, kepegawaian, dan lain-lain.
 - Kehandalan alur dan konektivitas data antara aplikasi pengelolaan barang milik daerah dengan aplikasi pengelolaan keuangan daerah.

Terkait dengan kriteria pengamanan barang milik daerah salah satunya disebabkan proses pensertifikatan beberapa aset tanah milik Pemerintah Kota Makassar yang belum rampung sampai dengan tahun 2020. Dalam rangka pengamanan aset, pensertifikatan merupakan poin yang sangat penting, namun dalam proses pelaksanaannya membutuhkan koordinasi kepada instansi terkait. Untuk kedepannya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset akan terus melakukan upaya pengamanan aset daerah secara optimal dan berkesinambungan setiap tahunnya khususnya meningkatkan koordinasi dengan pihak BPN melalui dinas pertanahan Kota Makassar dalam proses pensertifikatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang lebih baik.

3.2.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2

“Meningktanya Kualitas Sumber Daya Manusia, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD”

Sasaran Strategis 2 Meningktanya Kualitas Sumber Daya Manusia, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD				
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	90%	96,91	107,68%
2	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%
3	Persentase ASN perangkat daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	90%	44,6%	49,55%

Indikator Kinerja 1

Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik

Capaian kinerja sasaran Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 10
Target dan Realisasi Capaian Sasaran 2 Indikator 1
Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	90%	96,91	107,68%

Capaian kinerja indikator Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik dengan target 90% barang yang dipelara dalam kondisi baik, realisasi kinerja 96,91% dengan capaian kinerja adalah 107,68%. Berikut merupakan data target dan realisasi pemeliharaan sarana-prasarana BPKAD Kota Makassar tahun 2021 :

Tabel 11
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BPKAD Tahun 2021

No.	Pemeliharaan	Target	Realisasi
1	Mobil Jabatan	1 Unit	1 Unit
2	Mobil Oprasional	15 Unit	15 Unit
3	Roda empat (Mobil)	5 Unit	5 Unit
4	Roda dua (Motor)	55 Unit	55 Unit
5	Mesin Fotocopy	6 Unit	6 Unit
6	AC	36 Unit	30 Unit
7	Komputer/Notebook	105 Unit	102 Unit
8	Warranty Server	3 Unit	3 Unit
9	Printer	80 Unit	80 Unit
10	Kulkas	7 Unit	7 Unit
11	Dispenser	7 Unit	6 Unit
12	Mesin Kopi	2 Unit	2 Unit
13	Alat Perekam	2 Unit	2 Unit
	Jumlah	324	314

Berdasarkan tabel di atas, target sarana dan prasarana yang akan dipelihara sebanyak 324 Unit, dengan realisasi 314 Unit barang dipelihara dengan baik. Adapun 10 Unit barang sudah tidak dapat dipelihara karena sudah masuk dalam keadaan rusak berat.

Faktor Penyebab Keberhasilan :

1. Proses Perencanaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan Pemeliharaan sudah teranggarkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Dukungan Anggaran yang memadai.
3. Proses pemilihan penyedia yang selektif dan berkualifikasi;
4. Dukungan dari seluruh pengguna barang yang bertanggungjawab;
5. Pengelola barang yang tertib administrasi dan bertanggungjawab.

Indikator Kinerja 2**Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah**

Capaian kinerja sasaran persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 12
Target dan Realisasi Capaian Sasaran 2 Indikator 2
Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah dengan target 100%, realisasi 100%, Capaian Realisasi kinerja adalah 100% atau termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Adapun kriteria persentase cakupan ketersediaan laporan kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah, adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Persentase Cakupan Ketersediaan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

No.	Ketentuan		Realisasi	
	Kriteria	%	Tersedia/ Tidak	%
1	Rencana Strategis	15	Tersedia	15
2	RKA-SKPD	5	Tersedia	5
3	RKA Perubahan	5	Tersedia	5
4	DPA-SKPD	5	Tersedia	5
5	DPA Perubahan	5	Tersedia	5
6	Renja SKPD	10	Tersedia	10
7	Renja Perubahan	5	Tersedia	5
8	Laporan Kinerja	10	Tersedia	10
9	Perjanjian Kinerja	5	Tersedia	5
10	PK Perubahan	5	Tersedia	5
11	Evaluasi Renja	5	Tersedia	5
12	Laporan Anggaran	Realisasi	5	Tersedia

	Kriteria	%	Tersedia/ Tidak	%
14	Catatan atas Laporan Keuangan	5	Tersedia	5
15	Laporan Operasional	5	Tersedia	5
16	Laporan Perubahan Ekuitas	5	Tersedia	5
Jumlah		100%	Jumlah	100%

Capaian indikator kinerja dari tabel di atas adalah adanya peningkatan dalam pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Sedangkan outcome yang dihasilkan adalah tersedianya dokumen RKA, DPA, Rencana Kerja, dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin), LAKIP SKPD, Evaluasi Renja serta laporan keuangan SKPD dalam bentuk dokumen LRA, Neraca, CALK, LO, dan LPE.

Faktor Penyebab Keberhasilan :

1. Proses Perencanaan dan Anggaran telah mengikuti alur mekanisme sesuai dengan peraturan-perundang undangan;
2. Dukungan dan arahan dari stakeholder yang membidangi keuangan dan perencanaan;
3. Dukungan dari Pejabat struktural, fungsional dan pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Adanya reward dan punishment bagi pengelola keuangan dan perencanaan dalam pencapaian target dalam bentuk peningkatan nilai TPP, Pelatihan dan penundaan anggaran.

Indikator Kinerja 3**Persentase ASN perangkat perangkat daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas**

Capaian kinerja sasaran Persentase ASN perangkat perangkat daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 14
Target dan Realisasi Capaian Sasaran 2 Indikator 3
Persentase ASN Perangkat Perangkat Daerah Yang
Mendapatkan Peningkatkan Kapasitas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase ASN perangkat perangkat daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	90%	44,6%	49,55%

Capaian indikator kinerja sasaran Persentase ASN perangkat perangkat daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas dengan target 90%, realisasi 44,6%, Capaian Realisasi kinerja adalah 49,55% atau termasuk dalam kategori Rendah. Adapun ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas pengembangan SDM, adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Daftar Pelatihan/Bimbingan Teknis/Seminar yang Diikuti pada
Tahun 2021

No.	Nama	Pelatihan/Bimtek/Seminar yang Diikuti
1	Abd. Rahman Halid	Pelatihan Teknologi Informasi
2	A. Ato Rakhmawan, S.IP, S.AP, M.AP	Pelatihan Training Certified Risk Management Officer (Level II)
3	Andi Megawati, SE	Pelatihan Training Certified Risk Management Officer (Level II)
4	Emyl Satria Bakri Putra, SE	Pelatihan Training Certified Risk Management Officer (Level II)
5	Mulianty Takbir, S.Sos, M.Si	Pelatihan Training Certified Risk Management Officer (Level II)
6	Abd. Rahman Halid	Pelatihan Training Certified Risk Management Officer (Level II)
7	Andi Rahmat, S.STP, M.Si	Pelatihan Reviu Materi Ujian Nasional Serifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar
8	A. Ato Rakhmawan, S.IP, S.AP, M.AP	Pelatihan Reviu Materi Ujian Nasional Serifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar

No.	Nama	Pelatihan/Bimtek/Seminar yang Diikuti
9	Maryana Panggalo, S.IP	Pelatihan Reviu Materi Ujian Nasional Serifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar
10	Emyl Satria Bakri Putra, SE	Pelatihan Reviu Materi Ujian Nasional Serifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar
11	Abd. Rahman Halid	Pelatihan Reviu Materi Ujian Nasional Serifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar
12	Abd. Rahman Halid	Pelatihan Data Centre Berbasis Virtualisasi dengan Vmware vSphere
13	Azrul Sueb, S.Kom	Pelatihan Data Centre Berbasis Virtualisasi dengan Vmware vSphere
14	Marsi Sisong, S.Kom	Pelatihan Data Centre Berbasis Virtualisasi dengan Vmware vSphere
15	Andi Muhsina B, SE	Pelatihan Diklat Materi PBJ Tk. Dasar Perpres 16 Tahun 2018 serta Perubahannya berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021 dan Turunannya, serta Ujian Serifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
16	Indra Pratama Ingkiriwan, S.T	Pelatihan Diklat Materi PBJ Tk. Dasar Perpres 16 Tahun 2018 serta Perubahannya berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021 dan Turunannya, serta Ujian Serifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
17	Wirahadi Muhshy, S.Kom	Pelatihan Diklat Materi PBJ Tk. Dasar Perpres 16 Tahun 2018 serta Perubahannya berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021 dan Turunannya, serta Ujian Serifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18	Muhammad Tahir Arhal, S.Kom	Pelatihan Diklat Materi PBJ Tk. Dasar Perpres 16 Tahun 2018 serta Perubahannya berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021 dan Turunannya, serta Ujian Serifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
19	Andi Megawati, SE	Pelatihan Diklat Materi PBJ Tk. Dasar Perpres 16 Tahun 2018 serta Perubahannya berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021 dan Turunannya, serta Ujian Serifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
20	Susanti, S.Kom	Pelatihan Diklat Materi PBJ Tk. Dasar Perpres 16 Tahun 2018 serta Perubahannya berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021 dan Turunannya, serta Ujian Serifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
21	Sri Rahmawati Muslimin, S.E	Pelatihan Diklat Materi PBJ Tk. Dasar Perpres 16 Tahun 2018 serta Perubahannya berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021 dan Turunannya, serta Ujian Serifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan tabel di atas, dari 47 Orang target pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, sebanyak 21 orang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan selama tahun 2021, kuantitas pekerjaan yang sangat banyak menjadi alasan utama yang

menyebabkan kurangnya pegawai yang mengikuti kursus atau bimtek, capaian dari indikator sasaran tersebut pada tahun 2021 mencapai 44,6%.

Faktor Penghambat Keberhasilan :

1. Pandemic Covid-19 yang masih terjadi membuat terbatasnya keterbukaan Akses Pendidikan dan Pelatihan;
2. Kuantitas pekerjaan yang sangat banyak membuat terbatasnya waktu pegawai untuk mengikuti diklat;
3. Diklat yang masih menggunakan Ujian Tatap Muka tertuma untuk ujian sertifikasi;
4. Tidak adanya punishment dan reward yang diberikan bagi pegawai yang tidak/ikut dalam pengembangan kompetensi.

Rekomendasi :

1. Bekerjasama dengan Lembaga diklat untuk mengadakan pelatihan dikantor;
2. Mengirim/mengikutkan pegawai untuk diklat via Daring / Non Tatap Muka.
3. Memberikan Reward bagi pegawai yang terus melakukan pengembangan kompetensi dalam bentuk promosi jabatan.
4. Memberikan Punishment bagi pegawai yang tidak melakukan pengembangan kompetensi dalam bentuk promosi demosi/rotasi jabatan.

3.2.3 Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan realisasi kinerja dan capaian kinerja BPKAD Kota Makassar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kinerja Tahun 2021 yang merupakan tahun awal RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 dibandingkan dengan capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 16
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya dan 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
			Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	100	100	100	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	100	100	100	WTP	WDP	75
		Persentase barang milik daerah yang diyakini kewajarannya oleh BPK	N/A (belum dijadikan indikator)	N/A (belum dijadikan indikator)	105	95	99,83%	105
2	Meningktanya Kualitas Sumber Daya Manusia, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	93	83	100	90	96,91	107,68%
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	100	100
		Persentase ASN perangkat daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	58	94	0	90	44,6	49,55

3.2.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis

Analisis Capaian Kinerja Strategis ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tujuan dan sasaran BPKAD Kota Makassar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026, dimana hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal tersebut dilakukan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Sasaran, dalam pencapaiannya berfokus pada penyusunan kegiatan sehingga akan menggambarkan sasaran yang ingin dicapai.

Evaluasi atas suatu kegiatan yang diutamakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan menjadi rencana pelaksanaan oleh yang memangku kepentingan, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari kegiatan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar untuk pencapaiannya dalam tahun yang telah ditentukan, sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian yang telah ditetapkan, penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada hasil evaluasi, sehingga memiliki data baseline, untuk perkiraan kinerja capaian yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tabel berikut dapat dihubungkan target pencapaian kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra SKPD sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam pencapaian target indikator sasaran terhadap target yang belum berhasil dicapai.

Tabel 17
Target Kinerja, Realisasi Kinerja, Capaian Kinerja Dalam Renstra 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Tahun Ke-						Realisasi Tahun ke-					Capaian Kinerja Tahun Ke-	
			1	2	3	4	5	Akhir	1	2	3	4	5	Akhir	1
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	-	-	-	-	100
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	-	-	-	-	75
		Persentase barang milik daerah yang diyakini kewajarannya oleh BPK	95	97	97	97	98	100	99,83%	-	-	-	-	-	105
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	90	90	90	90	90	90	96,91	-	-	-	-	107,68%	
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	
		Persentase ASN perangkat perangkat daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	90	90	90	90	90	90	44,6	-	-	-	-	49,55%	

3.2.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara keseluruhan Analisis efisiensi penyerapan anggaran belanja, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	100	62,73	37,28
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	75	63,02	0
		Persentase barang milik daerah yang diyakini kewajarannya oleh BPK	105	66,02	33,98
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	107,68%		
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	100	84,67	15,33
		Persentase ASN perangkat perangkat daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	49,55	28,37	0

Tingkat Efisiensi dapat diukur dengan Capaian kinerja yang berhasil dengan membandingkan anggaran yang digunakan dapat efektif dalam pencapaian kinerja, dapat dilihat hanya 4 indikator yang efektif mencapai target sehingga tingkat efisiensi anggaran hanya dapat diukur pada indikator sasaran tersebut.

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Kinerja

Capaian kinerja secara menyeluruh BPKAD Kota Makassar Tahun 2021, terdapat 4 (empat) sasaran yang tercapai dari 6 (enam) indikator sasaran, kondisi ini tidak terlepas dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator sasaran terkait. Berikut ini adalah tabel sasaran kinerja yang telah berhasil dicapai beserta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja tersebut :

Tabel 19
Analisis Program/Kegiatan Penyebab Keberhasilan Kinerja

No.	Indikator Sasaran Strategis	% Capaian	Program	Kegiatan
1.	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Kordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2	Persentase barang milik daerah yang diyakini kewajarannya oleh BPK	105	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Pengelolaan Barang Milik Daerah
3	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	107,68	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penujunag Urusan Pemerintahan Daerah 2 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujunag Urusan Pemerintahan Daerah
4	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Perencanaan, Pengaanggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah 4 Administrasi keuangan perangkat daerah

3.3 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang berlaku

meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang SKPD. Sedangkan Instrumen utama akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah dan data laporan tahunan yang disusun secara periodik sehingga nampak proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk dipertanggungjawabkan dan pengendaliannya pada berbagai tingkatan operasi dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2021.

Realisasi capaian keuangan tahun 2021 BPKAD Kota Makassar dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 20
Realisasi Pendapatan & Belanja Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	2.410.006.472.000,-	2.236.368.922.807,25	92,79
1.1	Pendapatan Asli Daerah	159.171.136.303,82	90.671.249.756,25	56,95
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	82.746.654.000,-	22.251.084.159,45	26,89
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	76.424.482.303,82	68.420.165.596,80	89,53
1.2	Pendapatan Transfer	2.046.855.278.000,-	1.979.478.474.976,-	96,71
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.692.350.511.000,-	1.687.551.396.041,-	99,72
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	30.304.767.000,-	30.304.767.000,-	100
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	324.200.000.000,-	261.622.311.935,-	80,70
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	204.006.472.000,-	166.219.198.075,-	81,48
2	Belanja	285.741.428.698,12	188.195.175.600,-	65,86
2.1	Belanja Operasi	34.565.970.887,-	25.110.172.397,-	72,64
2.1.1	Belanja Pegawai	10.789.378.931,-	9.273.602.140,-	85,95
2.1.2	Belanja Barang	23.776.591.956,-	15.836.570.257,-	66,61
2.2	Belanja Modal	1.191.188.125,-	657.879.126,-	55,23
2.3	Belanja Tidak Terduga	249.984.269.686,12	162.427.124.077,-	64,97

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran TA. 2021 (Unaudited)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah mengelola pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan Yang Sah dengan Realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp. 2.236.368.922.807,25 atau 92,79% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.410.006.472.000,- terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 90.671.249.756,25 atau 56,95% dari target sebesar Rp.159.171.136.303,82, realisasi pendapatan transfer sebesar

Rp.1.979.478.474.976,- atau 96,71% dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.046.855.278.000, dan realisasi Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah tahun 2021 sebesar Rp. 166.219.198.075,- atau 81,48% dari alokasi target anggaran sebesar Rp. 204.006.472.000,-.

Realisasi belanja sebesar Rp. 188.195.175.600 merupakan realisasi belanja operasi, belanja modal, dan Belanja tidak terduga. Realisasi belanja operasi terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 9.273.602.140 dari anggaran sebesar Rp.10.789.378.931 atau 85,95% dan realisasi belanja barang sebesar Rp.15.836.570.257 dari anggaran sebesar Rp.23.776.591.956 atau 66,61%. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp.657.879.126 dari anggaran Rp.1.191.188.125 atau 55,23%. Sedangkan realisasi Belanja Tidak Terduga Sebesar 162.427.124.077 dari anggaran sebesar Rp.249.984.269.686,12 atau sebesar 64,97%. Sedangkan target dan realisasi anggaran per program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dicapai pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 21
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	18.730.308.612	14.518.122.966	77,51
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	274.642.606	214.567.215	78,13
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	194.704.606	175.122.970	89,94
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.275.000	9.287.850	43,66
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	21.225.000	6.639.900	31,28
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.975.000	4.975.000	100
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.470.000	6.331.475	50,77
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.223.000	3.240.320	52,07
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.770.000	8.969.700	65,14
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.241.631.931	10.383.393.850	84,82
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.239.478.931	8.847.762.140	86,41
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	546.600.000	425.840.000	77,91
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.234.198.000	956.686.400	77,51

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	38.573.000	17.080.035	44,28
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.900.000	1.740.700	44,63
06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	47.910.000	15.728.640	32,83
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	130.972.000	118.555.935	90,52
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	442.000.000	175.800.000	39,77
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	141.000.000	90.400.000	64,11
02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	301.000.000	85.400.000	28,37
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.359.505.000	1.454.895.511	61,66
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.976.250	13.941.500	82,12
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	235.901.000	133.183.325	56,46
03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	372.815.750	257.442.000	69,05
04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	180.000.000	70.367.600	39,09
05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.320.000	23.880.000	59,23
06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000	21.450.000	35,75
07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	715.000.000	412.712.686	57,72
08	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	302.392.000	288.667.400	95,46
09	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	436.100.000	233.251.000	53,49
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.099.688.125	657.879.126	59,82
01	Pengadaan Mebel	400.000.000	162.256.126	40,56
02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	699.688.125	495.623.000	70,83
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	819.560.800	625.967.220	76,38
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.320.000	506.000	21,81
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	633.000.000	516.619.564	81,61
03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.240.800	108.841.656	59,08
6	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.493.280.150	1.005.620.044	67,34

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.157.200	23.541.442	66,96
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	606.565.950	519.744.602	85,69
03	Pemeliharaan Mebel	13.440.000	-	-
04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	375.110.000	217.334.000	57,94
05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	380.000.000	182.000.000	47,89
06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.007.000	63.000.000	75,90
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	263.343.243.286	171.255.397.572	65,03
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	8.005.497.000	5.021.929.364	62,73
01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	441.230.000	252.489.390	57,22
02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	412.730.000	250.264.350	60,64
03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	40.300.000	34.487.315	85,58
04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	40.300.000	34.009.885	84,39
05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	130.300.000	-	-
06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	67.300.000	36.069.150	53,59
07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.163.470.000	553.898.120	47,61
08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	992.231.000	386.618.055	38,96
09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2.403.723.000	1.600.598.206	66,59
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1.378.707.000	1.156.368.641	83,87
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	19.860.000	12.608.320	63,49
12	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	915.346.000	704.517.932	76,97

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.413.335.400	1.098.704.656	77,74
01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	688.050.400	557.329.546	81,00
02	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	104.485.000	93.207.500	89,21
03	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	-	-	-
04	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	45.368.000	24.736.460	54,52
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	28.341.000	25.379.485	89,55
06	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	27.297.000	22.872.940	83,79
07	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	84.460.000	25.446.815	30,13
08	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-	-	-
09	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	435.334.000	349.731.910	80,34
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.964.797.200	1.238.187.893	63,02
01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	130.689.000	84.455.070	64,62
02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	142.683.200	125.931.068	88,26
03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	84.651.000	39.352.580	46,49
04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	95.856.000	86.541.200	90,28

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	464.742.000	322.216.600	69,33
06	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	158.903.000	100.930.510	63,52
07	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	169.096.000	56.580.820	33,46
08	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	150.524.000	40.858.830	27,14
09	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	567.653.000	381.321.215	67,18
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	250.031.063.686	162.462.033.427	64,98
01	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	46.794.000	34.909.350	74,60
02	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	249.984.269.686	162.427.124.077	64,97
5	Pengelolaan data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah Lingkup Keuangan Daerah	1.928.550.000	1.434.542.232	74,38
01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	360.000.000	240.000.000	66,67
02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1.248.650.000	1.106.547.750	88,62
03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	319.900.000	87.994.482	27,51
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.667.876.800	2.421.655.062	66,02
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.667.876.800	2.421.655.062	66,02
01	Penyusunan Standar Harga	148.362.000	74.325.640	50,10
02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	102.075.000	74.940.225	73,42
03	Penatausahaan Barang Milik Daerah	228.249.800	179.290.647	78,55
04	Penilaian Barang Milik Daerah	83.729.000	34.191.825	40,84
05	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	292.554.000	150.442.935	51,42

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
06	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	572.346.000	301.668.585	52,71
07	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	58.509.000	26.938.225	46,04
08	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2.182.052.000	1.579.856.980	40,60
Jumlah		285.741.428.698	188.195.175.600	65,86

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran TA. 2021 (Unaudited)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi Belanja Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021 sebesar 65,86%, atau Rp.188.195.175.600 dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 285.741.428.698. Pada kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat Belanja tidak terduga yang disalurkan hampir seluruhnya untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan realisasi sebesar Rp.162.427.124.077 dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga
Tahun Anggaran 2021

No.	SKPD/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN
1	Dinas Kesehatan Kota Makassar dalam rangka Penanganan /Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid- 19)	92.141.488.712
2	Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka Penanganan /Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid- 19)	20.109.391.800
3	Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam rangka Penanganan /Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid- 19)	774.906.400
4	BPBD Kota Makassar dalam rangka Penanganan /Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid19)	14.177.031.215
5	SATPOL PP Kota Makassar dalam rangka Penanganan /Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid- 19)	35.076.689.370
6	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada beberapa orang	107.976.280
7	Pengembalian Atas Kesalahan Transfer	39.640.300
Total		162.427.124.077

PENUTUP

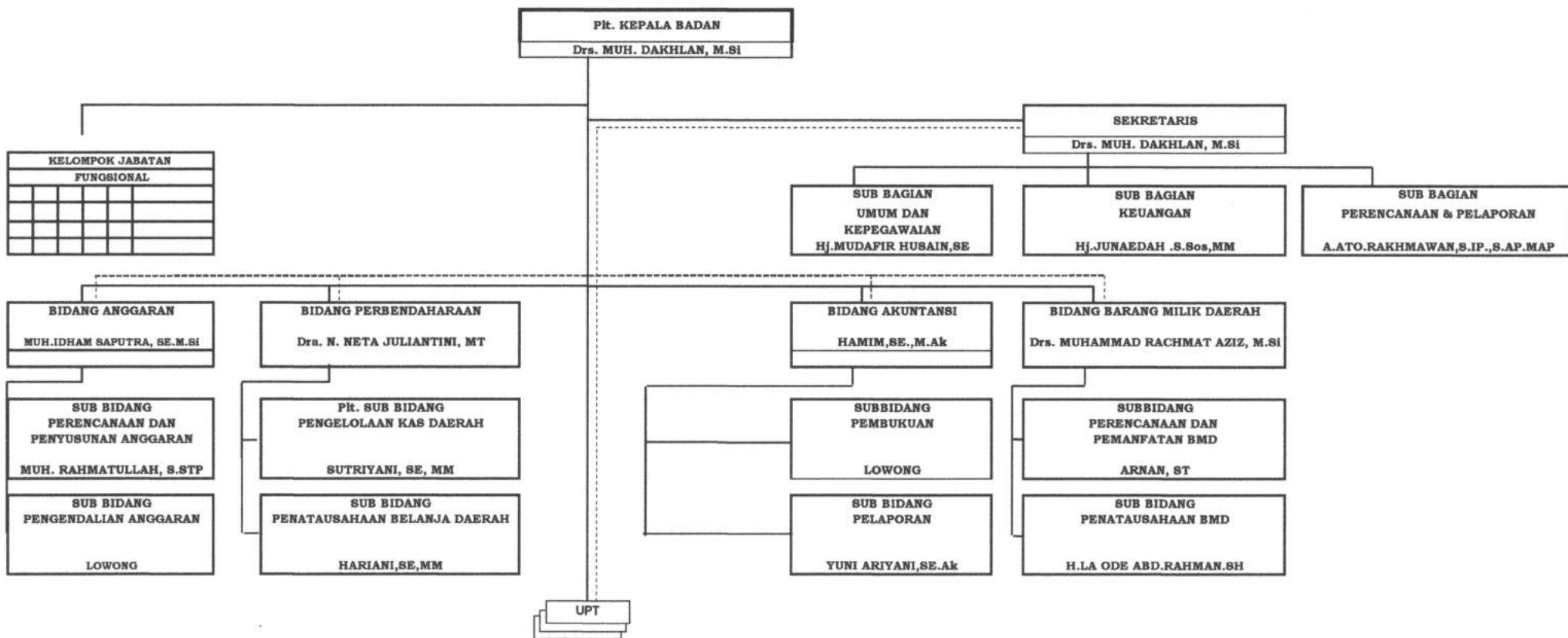
Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 menyajikan berbagai capaian maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis BPKAD tahun 2021 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian kinerja BPKAD tahun 2021 Secara keseluruhan dinyatakan “belum optimal” yaitu capaian 89,53% dari target yang telah ditetapkan. Dari sebanyak 6 indikator kinerja dari 2 sasaran, hanya 4 Indikator sasaran dinyatakan “berhasil” karena capaiannya diatas 90% dari target, secara keseluruhan capaian kinerja BPKAD tahun 2021 masih perlu ditingkatkan untuk tahun berikutnya, untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti mengevaluasi kegiatan dan program yang belum maksimal dan realisasi anggaran yang belum optimal, serta rencana aksi yang tidak sesuai dengan target pelaksanaan.

Meskipun beberapa indikator masih belum berhasil diantaranya target mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun secara keseluruhan capaian Kinerja Kementerian PANRB tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, kordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2021**





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. MUH. DAKHLAN, M.Si**
Jabatan : **Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO**
Jabatan : **WALIKOTA MAKASSAR**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 27 Oktober 2021

Pihak Kedua,

Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO

Pihak Pertama,

Drs. MUH. DAKHLAN, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat Waktu
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	WTP
		Persentase Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya oleh BPK	95%
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, Laporaan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	90%
		Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	90%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 18.730.308.612,00	
2 Program Pengelola Keuangan Daerah	Rp. 263.889.243.286,00	Indikator Kinerja Utama
3 Program Pengelolaan Barang Milik daerah	Rp. 3.667.876.800,00	Indikator Kinerja Utama
Jumlah	Rp. 286.287.428.698,00	

Makassar, 27 Oktober 2021

WALIKOTA MAKASSAR



[Signature]
H. MOH. RAMDHAN POMANTO

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PEM. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR



[Signature]
Drs. MUR. DAKHLAN, M.Si
NIP. 9740925 199311 1 005

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2022-2026

SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Sumber Data	Keterangan/Rumus Perhitungan
1	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Berkualitas dan Bermanfaat (Tertib, Taat pada Perundang-Undangan, Efisien, Transparan dan Akuntabel.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)
			2. Ketetapan Waktu Penetapan APBD	1. Surat Pengantar KUA-PPAS Pokok 2. Penetapan APBD Pokok	1. Tanggal Penyampaian Rancangan KUA-PPAS Minggu kedua Juli 2. Tanggal Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD tentang APBD sebelum 30 September
			3. Persentase Barang Milik Daerah yang Diyakini Kewajarannya oleh BPK	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	$\frac{\text{Nilai Aset Tetap Yang Telah Diakui Kewajarannya Oleh BPK}}{\text{Nilai Total Aset}} \times 100\%$

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH



DRS. MUH. DAKHLAN, M.Si
 Pangkat : Pembina Tk.I
 Nip : 19740925 199311 1 005

BERITA ACARA

Nomor : 188.34.903/152/BA/BPKAD/IX/2021

Nomor : 188.342/116/DPRD/IX/2021

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAKASSAR DAN DPRD KOTA MAKASSAR

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO** : Walikota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.2 Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **RUDIANTO LALLO,SH** : Ketua DPRD Kota Makassar
3. **ADI RASYID ALI, SE, MM** : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar
4. **ANDI SUHADA SAPPAILE** : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar
5. **H. ANDI NURHALDIN** : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

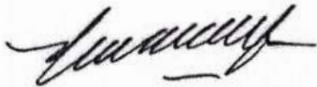
menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPAPBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPAPBD Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

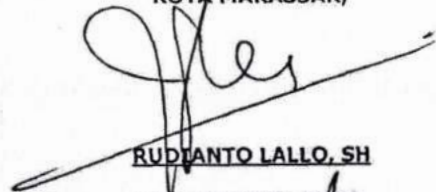
Makassar, 30 September 2021

WALIKOTA MAKASSAR,



Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO

KETUA DPRD
KOTA MAKASSAR,



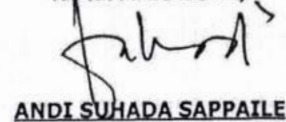
RUDIANTO LALLO, SH

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAKASSAR,



ADI RASYID ALI, SE, MM

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAKASSAR,



ANDI SUHADA SAPPAILE

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAKASSAR,



H. ANDI NURHALDIN

BERITA ACARA

Nomor : 188.34.903/175/BA/BPKAD/XI/2021

Nomor : 188.342/1344/DPRD/XI/2021

**PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAKASSAR DAN DPRD
KOTA MAKASSAR
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO** : Walikota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.2 Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **RUDIANTO LALLO,SH** : Ketua DPRD Kota Makassar
3. **ADI RASYID ALI, SE, MM** : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar
4. **ANDI SUHADA SAPPAILE** : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar
5. **H. ANDI NURHALDIN** : Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

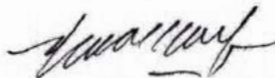
menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan RAPBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

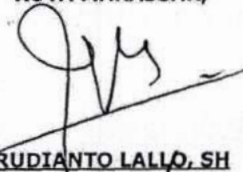
Makassar, 24 November 2021

WALIKOTA MAKASSAR,



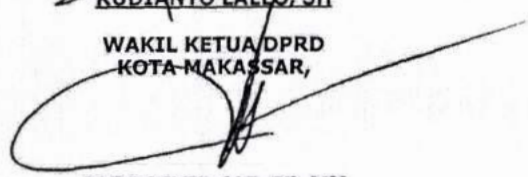
Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO

**KETUA DPRD
KOTA MAKASSAR,**



RUDIANTO LALLO, SH

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAKASSAR,**




ADI RASYID ALI, SE, MM

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAKASSAR,**



ANDI SUHADA SAPPAILE

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAKASSAR,**



H. ANDI NURHALDIN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	82.746.654.000,00	22.251.084.159,45	60.495.569.840,55	26,89	31.875.688.803,93
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	76.424.482.303,82	68.420.165.596,80	8.004.316.707,02	89,53	33.631.674.627,08
1.1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	159.171.136.303,82	90.671.249.756,25	68.499.886.547,57	56,96	65.507.363.431,01
1.2	PENDAPATAN TRANSFER					
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
1.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	95.263.092.000,00	148.295.851.881,00	(53.032.759.881,00)	155,67	113.943.184.588,00
1.2.1.02	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.016.966.000,00	7.438.257.946,00	(2.421.291.946,00)	148,26	4.842.507.754,00
1.2.1.03	Dana Alokasi Umum	1.257.670.897.000,00	1.233.440.789.380,00	24.230.107.620,00	98,07	1.249.647.391.000,00
1.2.1.04	Dana Alokasi Khusus	334.399.556.000,00	298.376.496.834,00	36.023.059.166,00	89,23	307.688.439.945,00
1.2.1	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.692.350.511.000,00	1.687.551.396.041,00	4.799.114.959,00	99,72	1.676.121.523.287,00
1.2.2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
1.2.2.01	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.03	Dana Penyesuaian	30.304.767.000,00	30.304.767.000,00	0,00	100,00	74.623.320.000,00
1.2.2	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya	30.304.767.000,00	30.304.767.000,00	0,00	100,00	74.623.320.000,00
1.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
1.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	324.200.000.000,00	261.622.311.935,00	62.577.688.065,00	80,70	302.750.607.332,13
1.2.3.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	324.200.000.000,00	261.622.311.935,00	62.577.688.065,00	80,70	302.750.607.332,13
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	165.818.274.714,00
1.3.4	Bantuan Keuangan	32.406.000.000,00	7.004.400.000,00	25.401.600.000,00	21,61	0,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	171.600.472.000,00	159.214.798.075,00	12.385.673.925,00	92,78	0,00
1.3	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	204.006.472.000,00	166.219.198.075,00	37.787.273.925,00	81,48	165.818.274.714,00
1	JUMLAH PENDAPATAN	2.410.032.886.303,82	2.236.368.922.807,25	173.663.963.496,57	92,79	2.284.821.088.764,14
2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERASI					
2.1.1	Belanja Pegawai	10.789.378.931,00	9.273.602.140,00	1.515.776.791,00	85,95	13.764.456.559,00
2.1.2	Belanja Barang	23.776.591.956,00	15.836.570.257,00	7.940.021.699,00	66,61	9.799.015.039,00
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6	7
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	185.766.766.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000.000,00
2.1	Jumlah Belanja Operasi	34.565.970.887,00	25.110.172.397,00	9.455.798.490,00	72,64	210.590.237.598,00
2.2	BELANJA MODAL					
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	1.191.188.125,00	657.879.126,00	533.308.999,00	55,23	183.250.000,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Jumlah Belanja Modal	1.191.188.125,00	657.879.126,00	533.308.999,00	55,23	183.250.000,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA					
2.3.1	Belanja Tak Terduga	249.984.269.686,12	162.427.124.077,00	87.557.145.609,12	64,97	83.108.628.693,00
2.3	Jumlah Belanja Tak Terduga	249.984.269.686,12	162.427.124.077,00	87.557.145.609,12	64,97	83.108.628.693,00
2.4	TRANSFER					
2.4.1	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA					
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN					
2.4.2.1	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2	Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.896.000,00
2.4.2	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.896.000,00
2	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	285.741.428.698,12	188.195.175.600,00	97.546.253.098,12	65,86	295.052.012.291,00
	SURPLUS/DEFISIT	2.124.291.457.605,70	2.048.173.747.207,25	76.117.710.398,45	96,42	2.015.789.076.473,14
.3	PEMBIAYAAN	587.928.271.047,79	587.978.112.298,21	(49.841.250,42)	100,01	239.051.988.218,19
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.1.01	Penggunaan SILPA	592.928.271.047,79	592.978.112.298,21	(49.841.250,42)	100,01	239.051.988.218,19
3.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.04	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.05	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.06	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.07	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.08	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6	7
3.1.10	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	592.928.271.047,79	592.978.112.298,21	(49.841.250,42)	100,01	239.051.988.218,19
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
3.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100,00	0,00
3.2.03	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.04	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.05	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.06	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.07	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.08	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.09	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.10	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.11	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	587.928.271.047,79	587.978.112.298,21	(49.841.250,42)	100,01	239.051.988.218,19
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	2.712.219.728.653,49	2.636.151.859.505,46	76.067.869.148,03	97,20	2.254.841.064.691,33